

Perputaran Uang Tambang Emas Ilegal Capai Rp992 T

Dari Halaman 1

kan 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) dan 2 Laporan Informasi terkait sektor tambang dengan nominal transaksi mencapai Rp517,47 triliun.

IA menjelaskan dari temuan PPATK itu paling banyak terkait aksi penambangan dan distribusi emas ilegal yang tersebar di pelbagai wilayah Indonesia.

"Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumat-

era Utara, Pulau Jawa, dan pulau lainnya, serta terdapat praktik aliran emas hasil PETI menuju pasar luar negeri," ujarnya.

Sementara di sektor lingkungan hidup, kata dia, PPATK telah menyerahkan 15 LHA dengan nominal transaksi dugaan pidana mencapai Rp198,70 triliun.

Natsir mengatakan salah temuan yang menjadi sorotan PPATK yakni adanya perbuatan pidana dan mengakibatkan komoditas strategis menjadi langka dan harganya melambung di

tanah air.

"Pada sektor kehutanan, PPATK telah menyampaikan 3 LHA kepada Kementerian Kehutanan dengan nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp137 miliar," tuturnya.

IA menjelaskan nilai transaksi tersebut diduga merupakan hasil jual beli kayu yang berasal dari penebangan pohon secara illegal.

"Karena tidak ditemukan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu yang menjadi prasyarat utama legalitas usaha kehutanan," katanya.(cnni/js)

Ibukota Masih Terendam

Dari Halaman 1

jadi di 46 RT dan 13 ruas jalan tergenang," kata Yohan dalam keterangannya, Kamis.

Banjir terjadi imbas hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak pagi menyebabkan kenaikan di sejumlah pintu air.

Yohan mengatakan, BPBD DKI Jakarta hingga saat ini masih mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.

Yohan menyebut pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat hingga lurah dan camat untuk melakukan penyedotan genangan serta memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ucap dia.

Berikut daftar wilayah yang terendam banjir:

1. Kelurahan Duri Kosambi: 2 RT
2. Kelurahan Kapuk: 2 RT
3. Kelurahan Kedaung Kali Angke: 4 RT
4. Kelurahan Rawa Buaya: 5 RT
5. Kelurahan Kedoya Selatan: 5 RT
6. Kelurahan Kembangan Selatan: 3 RT
- Ketinggian: 20 s.d 90 cm

Penyebab: curah hujan tinggi, luapan kali Pesanggrahan dan luapan Kali Angke

Jakarta Selatan terdapat 4 RT, yang terdiri dari:

1. Kelurahan Cipulir: 1 RT

2. Kelurahan Pejaten Timur: 3 RT

- Ketinggian: 30 s.d 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi, Luapan Kali Ciliwung dan Luapan Kali Pesanggrahan

Jakarta Timur terdapat 18 RT, yang terdiri dari:

1. Kelurahan Rawa Terate: 1 RT
2. Kelurahan Bidara Cina: 4 RT
3. Kelurahan Cipinang Muara: 2 RT
4. Kelurahan Kampung Melayu: 4 RT
5. Kelurahan Cawang: 5 RT
6. Kelurahan Cililitan: 2 RT
- Ketinggian: 20 s.d 110 cm

- Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung

Jakarta Utara terdapat 3 RT, yang terdiri dari:

1. Kelurahan Cilincing: 1 RT
2. Kelurahan Marunda: 1 RT
3. Kelurahan Rorotan: 1 RT
- Ketinggian: 20 s.d 30 cm

- Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Nagrak

Berikut daftar ruas jalan yang terendam banjir:

1. JL. KS Tubun, Kel. Petamburan, Jakarta Pusat

- Ketinggian: 15 cm

2. JL. Rawa Indah Dua, Kel. Pegangsaan Dua, Jakarta Utara

- Ketinggian: 15 cm

3. JL. Terusan Klp Hybrida Rawa Indah, Kel. Sukapura, Jakarta Utara

- Ketinggian: 10 cm

4. Jl. Inspeksi Kirana, Kel. Semper Timur, Jakarta Utara

- Ketinggian: 50 cm

5. Jl. Daan Mogot KM 12 (Seberang Victoria / Pabrik Gelas), Kel. Cengkareng Timur, Jakarta Barat

- Ketinggian: 15 cm

6. Jl. Puri Kembangan (Depan Sekolah SMK Budi Murni), Kel. Kedoya Selatan, Jakarta Barat

- Ketinggian: 15 cm

8. Jl. Komplek BTN Rt 06 & 07 Rw 03, Kel. Meruya Utara, Jakarta Barat

- Ketinggian: 20 cm

9. Jl. Daan Mogot Halte Taman Kota, Kel. Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat

- Ketinggian: 15 cm

10. Jl. Cileduk Raya, Kel. Cipulir, Jakarta Selatan

- Ketinggian: 15 cm

11. Jl. Pulo Raya IV, Kel. Petogogan, Jakarta Selatan

- Ketinggian: 45 cm

12. GG. Langgar, Kel. Rawajati, Jakarta Selatan

- Ketinggian: 30 cm

13. Jl. Raya Cipinang Indah (Titik Kenal SMK Penabur), Kel. Pondok Bambu, Jakarta Timur

- Ketinggian: 10 cm (cnni/js)

Aceh Tengah Masih Tanggap Darurat Bencana

Dari Halaman 1

"Hari ini yang masih terisolir itu ada delapan desa lagi di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Linge dan Ketol," kata Haili Yoga kepada wartawan, Kamis (29/1).

Untuk itu pihaknya memperpanjang masa tanggap darurat bencana ke tujuh kalinya untuk membuka akses jalan ke delapan desa tersebut. Sejauh ini desa itu hanya bisa dilalui lewat udara untuk mengirim logistik.

Tertutupnya akses ke sana karena banyak

Purbaya Obrak-abrik Bea Cukai

Dari Halaman 1

Kekayaan Negara (DJKN), dan 1 orang pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Dalam pelantikan tersebut, Purbaya menegaskan pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan tugas negara dan bentuk kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan melalui kepemimpinan.

"Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak Saudara-Saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja," ujar Purbaya seperti dikutip dari keterangan resmi Kemenkeu.

Purbaya juga menekankan pentingnya merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong pertumbuhan dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tengah

Gus Alex Diperiksa Auditor BPK

Dari Halaman 1

Pemeriksaan itu dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

"Pemeriksaan hari ini fokus berkaitan dengan perhitungan kerugian negara di mana dalam konstruksi yang digunakan dalam perkara ini adalah Pasal 2 dan Pasal 3 (UU Tipikor) yaitu dugaan kerugian keuangan negara, sehingga dalam proses pemeriksaannya hari ini dilakukan secara intensif oleh auditor BPK," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan video, Kamis (29/1).

Budi menjelaskan pemeriksaan ini untuk lengkap keterangan-keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan sejumlah saksi sebelumnya dari unsur Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), asosiasi dan biro perjalanan haji dan

tantangan dinamika geopolitik global.

Terlebih, Indonesia memiliki permintaan domestik yang besar, yang bisa didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat.

"Domestic demand kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair, karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair," ujarnya.

Karenanya, jajaran Kemenkeu, khususnya Bea dan Cukai, harus berada di lini terdepan dalam menjaga pasar dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri yang bersaing secara tidak fair.

Purbaya juga meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja lebih disiplin, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal dan pasar domestik berjalan secara bersih dan

umrah, serta pejabat di Kementerian Agama.

"Selain itu, untuk pemeriksaan saksi-saksi lainnya yang juga dilakukan di hari-hari sebelumnya sebagian dilakukan oleh penyidik KPK untuk melengkapi bukti-bukti awal yang sudah diperoleh sebelumnya, sehingga bukti yang ditemukan dalam perkara ini menjadi lebih kuat," tambah Budi.

Sementara itu, Ishfah Abidal Aziz enggan berkomentar mengenai materi pemeriksaannya hari ini. Dia menyerahkan semuanya ke KPK. Ishfah mulai diperiksa sekitar pukul 09.35 WIB dan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada 17.37 WIB.

"Itu langsung ke penyidik saja bang. Nanti pada waktunya saya akan memberi keterangan," kata Ishfah yang diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (29/1) sore.

KPK sudah menetapkan Yaqut dan Ishfah sebagai tersangka, namun belum melakukan

profesional demi kepentingan negara.

Pelantikan pejabat baru Bea Cukai ini dilakukan tak lama setelah Purbaya menyatakan akan 'mengobrak-abrik' jajaran pejabat DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dilakukan demi menekan kebocoran penerimaan negara.

"Saya sedang memperbaiki Bea Cukai dan Pajak. Ini serius besok diobrak-abrik tuh salah satu. Itu harusnya akan memperbaiki cara kerja Pajak dan Bea Cukai. Dan harusnya yang bocor-bocor itu enggak akan terjadi lagi ke depan," ujar Purbaya di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1), seperti dikutip Detik Finance.

Sebenarnya, Purbaya berniat merombak kedua direktorat tersebut sejak tahun lalu. Namun, ia menyadari baru menjadi Bendahara Negara pada September 2025. Selain itu, perombakan besar-besaran di akhir tahun juga berisiko mengganggu upaya menggenjot penyerapan negara.(cnni/js)

penahanan.

Hanya saja, pada 11 Agustus 2025, KPK sudah mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut, Ishfah, dan Fuad Hasan Masyhur. Pencegahan ke luar negeri akan habis pada Februari mendatang.

Lebih lanjut, KPK juga sudah mengeledah sejumlah tempat seperti rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.

Banyak barang bukti diduga terkait perkara disita. Di antaranya dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga kendaraan roda empat dan properti.

Menurut perhitungan awal KPK, kasus ini dianggap merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.(cnni/js)

Kemenag Diminta Jamin Kesejahteraan Guru Madrasah

Dari Halaman 1

Kemenag yang membawahi guru madrasah, guru agama Islam dan guru agama lainnya.

Berdasarkan penjelasan pemerintah, guru agama di madrasah saat ini berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), sementara guru agama lainnya tersebut di berbagai direktorat jenderal bimbingan masyarakat (bimas).

"Berarti guru di bawah Kementerian Agama itu tidak berada dalam satu direktorat jenderal. Ada Dirjen Pendis, ada Dirjen Bimas. Tapi yang sekarang menjadi persoalan serius kan guru-guru madrasah," kata Abidin dalam keterangan

nya, Kamis (30/1).

Abidin mengatakan nasib guru madrasah memprihatinkan, bahkan ada yang masih menerima honor sekitar Rp100 ribu per bulan. Ia meminta Kemenag memastikan data jumlah guru yang mengalami kondisi tersebut.

"Datanya ada atau tidak? Kalau ada, ini harus dimasukkan ke dalam mata anggaran ke depan. Tidak bisa dibiarkan. "Datanya harus benar. Jumlah guru-han harus jelas. Kalau tidak begitu, persoalan ini tidak akan pernah selesai," katanya.

Politikus PDIP itu pun mengancam bahwa Komisi VIII DPR tidak akan menyetujui anggaran Kemenag jika persoalan gaji guru madrasah yang dimasukkan secara jelas dalam perencanaan

"Komisi VIII tidak akan menyetujui anggaran kalau bagian ini tidak dimasukkan. Karena ini kewenangan pemerintah pusat, maka harus ada mata anggaran untuk menyelesaikan gaji guru-guru itu," ujar Abidin.

Abidin mengungkapkan, keluhan para guru madrasah telah disampaikan ke berbagai lembaga, mulai dari Badan Legislasi DPR, Komisi II, hingga Komisi VIII. Padahal, menurutnya, urusan pendidikan agama secara kelembagaan merupakan mitra kerja Komisi VIII DPR RI.

"Ke mana pun mereka mengadu, ujungnya tetap di Komisi VIII. Karena anggaran Kementerian Agama diperjuangkan di sini," ujarnya.(cnni/js)

Jumlah Pengungsi

Dari Halaman 1

pengungsi pascabencana di Sumatra ini terus mengalami penurunan dari hari ke hari.</p